

ANALISIS DATA PANEL KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH¹

ANALYSIS OF PANEL DATA OF POVERTY IN ACEH PROVINCE

Dewi Maya Sari², Zulfan³

Email: dewi@politeknikaceh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of gross regional domestic product and village funds on poverty in Aceh Province. The data used are secondary data in the form of Gross Regional Domestic Product (PDRB) data, village fund transfer data and poverty data from 23 districts / cities in Aceh Province over a three-year period (2017 to 2019). This study uses panel data regression analysis where the model used is the common effect. The results of this study indicate that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and village funds has a positive effect on poverty.

Keywords : *Poverty, Gross Regional Domestic Product, Village Funds.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto dan dana desa terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data transfer dana desa dan data kemiskinan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode tiga tahun (2017 s.d 2019). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dimana model yang digunakan adalah *common effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Dana Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Kata kunci : Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Desa.

1 Diterima 15 Juni 2021, direvisi 10 Juli 2021.

2 Dosen Politeknik Aceh

3 Dosen Universitas Syiah Kuala

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena yang sangat diperhatikan oleh pemerintah di berbagai negara khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan karena kemiskinan ini dapat menghambat pertumbuhan transformasi di negara berkembang dan menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakat. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagian besar negara di dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan uang. Namun, orang miskin sendiri menganggap pengalaman mereka miskin jauh lebih luas. Seseorang yang miskin dapat menderita berbagai kerugian pada saat yang sama. Misalnya mereka mungkin memiliki kesehatan yang buruk atau kekurangan gizi, kekurangan air bersih atau listrik, kualitas kerja yang buruk atau sekolah yang sedikit. Berfokus pada satu faktor saja, seperti pendapatan, tidak cukup untuk menangkap realitas kemiskinan yang sebenarnya (Swastika & Supriyatna, 2008).

Kemiskinan juga dianggap menjadi masalah multidimensional. Standar hidup atau fasilitas dasar menjadi karakteristik penentu kemiskinan multi dimensional di Indonesia. Fasilitas dasar yang dimaksud adalah adanya sumber penerangan, air bersih, sanitasi dan bahan bakar untuk memasak (Artha & Dartanto, 2018). Untuk mengatasi kesenjangan kawasan pedesaan dan perkotaan, Pemerintah melalui Nawa Cita berusaha untuk menerapkan paradigma baru untuk membangun pedesaan. Upaya ini dinamakan dengan jargon "Membangun Indonesia dari Pinggiran". Membangun

desa dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat desa dan memperkuat aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa (Nurpuspita, Sarfiah, & Ratnasari, 2016).

Kemiskinan di tingkat pedesaan telah menjadi perhatian utama dibandingkan dengan masalah kemiskinan perkotaan. Pada Maret 2019, angka kemiskinan perkotaan hanya 6,69%, sedangkan kemiskinan pedesaan mencapai 12,85% (Arham & Hatu, 2020). Kurangnya modal dan kurangnya alat produksi menjadi penyebab utama kemiskinan pada rumah tangga miskin (Nguyen & Nguyen, 2019)

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ketimpangan pedesaan dan kemiskinan pedesaan, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, yang mengatur masalah Transfer Dana Desa. Penetapan Undang-Undang Desa ini diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota dan sebagai daerah yang menjalankan otonomi khusus masih berselimut dengan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan di seluruh Indonesia pada tanggal 17 Februari 2021 dan menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 15,43%. Pada 2016 jumlah penduduk miskin di Aceh berjumlah 848,44 ribu jiwa atau 16,73 persen dari jumlah

seluruh penduduk Aceh. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan sampai pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 814,91 ribu jiwa atau 14,99 persen dari jumlah penduduk. Namun meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, Aceh tetap menduduki urutan pertama Provinsi termiskin di Sumatera pada tahun 2020.

Tingkat Kemiskinan di Aceh diukur dengan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) dimana metode

ini telah digunakan oleh BPS dari tahun 1998. Konsep kebutuhan dasar memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan. Penyumbang terbesar garis kemiskinan di Aceh adalah komoditi makanan yaitu sebesar 75,91% (BPS, 2019).

Tabel 1
Perkembangan Penduduk Miskin di Aceh, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan
	+		+			
	Perdesaan		Perdesaan			
2016	159,50	688,94	848,44	10,82	19,15	16,73
2017	172,35	700,26	872,61	11,11	19,37	16,89
2018	172,09	667,40	839,49	10,44	18,49	15,97
2019	168,11	651,33	819,44	9,68	18,03	15,32
2020	173,90	641,01	814,91	9,84	17,46	14,99

Catatan: Data Kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret
Sumber: BPS, 2020.

Dimensi lain persoalan kemiskinan di Aceh tidak hanya berupa jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga tingkat kedalaman dan kaparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi atau mendekati garis kemiskinan, sedangkan indeks kaparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pengentasan kemiskinan jauh dari harapan akibat

ketidaktepatan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan.

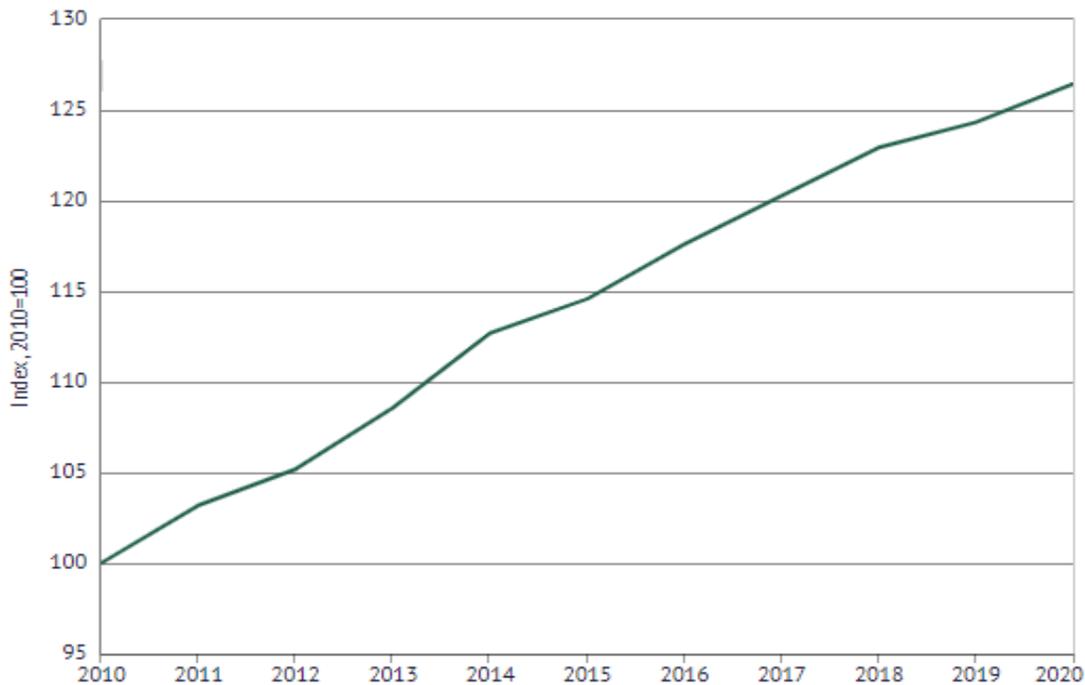
Karakteristik lain terkait dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi adalah ukuran rumah tangga yang lebih besar, tingkat pendidikan yang lebih rendah, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan rumah tangga yang sebagian besar bekerja di pertanian. Hubungan antara karakteristik ini dan kemiskinan relatif stabil selama periode tsunami yang menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu kemiskinan adalah tidak berubah meskipun terjadi

perubahan sosial-ekonomi dan politik yang cepat. Perbaikan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dapat dicapai jika pemerintah mengetahui variabel apa saja yang secara signifikan mempengaruhi kemiskinan.

Tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

Pada triwulan IV 2020, PDRB Aceh sebesar 42.739.711,5 juta rupiah. PDRB

Aceh meningkat dari 26.158.444 juta rupiah pada triwulan I 2011 menjadi 42.739.711,5 juta rupiah pada triwulan IV 2020 dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 1,29%. Ekonomi Aceh triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 turun sebesar 2,99 persen (y-on-y). Dari sisi produksi penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 27,98 persen. Dari sisi pengeluaran penurunan terbesar ada di komponen impor luar negeri sebesar 61,88 persen (BPS, 2020).



Gambar 1 Data PDRB Indonesia Tahun 2010-2020

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah Dana Desa. Negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa. Alokasi dana desa terus meningkat dari

tahun 2015 hingga saat ini dengan total tunjangan dana desa pada tahun 2018 mencapai Rp. 187 triliun. Tujuan dukungan keuangan untuk desa diharapkan dapat memajukan masyarakat. Namun kenyataannya, Program Dana Desa telah menjadi akar

korupsi kasus yang telah menyebabkan banyak warga desa tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia dan hidup dalam kemiskinan.

Dalam penerapan otonomi khusus di Aceh berdampak pada bergesernya sistem pemerintahan dari sistem terpusat ke sistem desentralisasi. Ini berimplikasi pada perubahan pada sistem manajemen pembangunan daerah. Pengaturan Pemerintahan Gampong telah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2003.

Dalam kerangka otonomi desa, semuanya bentuk urusan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa termasuk dalam hal mengelola keuangan desa. Atas dasar inilah desa memiliki kewenangan mengatur dan merawat masyarakat setempat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Keuangan desa memiliki peran penting dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, baik untuk belanja operasional desa administrasi dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari minimal 10% alokasi anggaran dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sumber utama penyelenggaraan Pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) umumnya 30% dananya digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, sedangkan sisanya 70% digunakan untuk pemberdayaan

masyarakat desa. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Desa memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan judul "Kemiskinan di Provinsi Aceh dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Desa".

B. STUDI PUSTAKA

1) Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS, 2020a). Menurut (Purnama, 2017) kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup.

Menurut (Suryani, Permadi, & Serif, 2019), pada umumnya klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan *Absolute*

Kemiskinan Absolute yaitu keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum;

b. Kemiskinan *Relative*

Kemiskinan relative yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan

perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya;

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan;

d. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat gambaran kinerja perekonomian makro suatu wilayah dalam periode tertentu (BPS, 2020). Dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, konsumsi Pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tersebut. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai output ekonomi bersih yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto juga diartikan sebagai jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit bisnis dalam area tertentu atau mewakili jumlah total dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh semua unit ekonomi di suatu daerah (Hamid & Yusuf, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

3) Dana Desa

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan untuk dilaksanakan pergeseran orientasi pembangunan nasional, membangun Indonesia melalui pembangunan desa. Untuk merealisasikan visi strategis tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp20,6 triliun pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp46,7 triliun pada tahun 2016 untuk 74.093 desa (Simangunsong & Wicaksono, 2017).

Menurut (Ramly, Wahyuddin, Mursyida, & Mawardati, 2018) Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa dengan tujuan:

a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- b) Meningkatkan kapasitas Lembaga Masyarakat di desa dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan lapangan kerja dan peluang pendapatan bagi warga desa.
- d) Mendorong peningkatan masyarakat swadaya

4) Kerangka Pemikiran Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan

Negara-negara yang dianggap berpenghasilan menengah ke atas memiliki lebih banyak kemiskinan di dalam perbatasannya daripada negara-negara yang dianggap berpenghasilan rendah. Hal ini bertentangan langsung dengan argumen "pertumbuhan memberantas kemiskinan". Negara dengan pendapatan lebih tinggi memiliki contoh kemiskinan yang lebih besar daripada negara dengan pendapatan lebih rendah. (Johnson, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dalam kaitannya dengan pertumbuhan PDB berhubungan langsung dengan pengurangan kemiskinan (Mulok, Kogid, Asid, & Lily, 2012). Dengan kata lain, pertumbuhan PDB yang tinggi seringkali dapat membantu mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB memiliki hubungan yang erat dengan

tingkat kemiskinan di negara mana pun. Hasil penelitian (Susilowati, Susilowati, & Hadi, 2017) menemukan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kemiskinan

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan di Aceh sebagian besar merupakan fenomena pedesaan. Lebih dari 30 persen rumah tangga pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan. Ini sebanding dengan kurang dari 15 persen rumah tangga miskin di perkotaan (World Bank, 2008). Hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa bertujuan mengurangi ketimpangan antardesa, dimana tujuan pemberian dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan (Artino, Juanda, & Mulatsih, 2019).

Berdasarkan data dari kementerian keuangan bahwa dari tahun 2015 anggaran untuk dana desa mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2015 dari 20,76 triliun menjadi 46,98 triliun di tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 60 triliun.

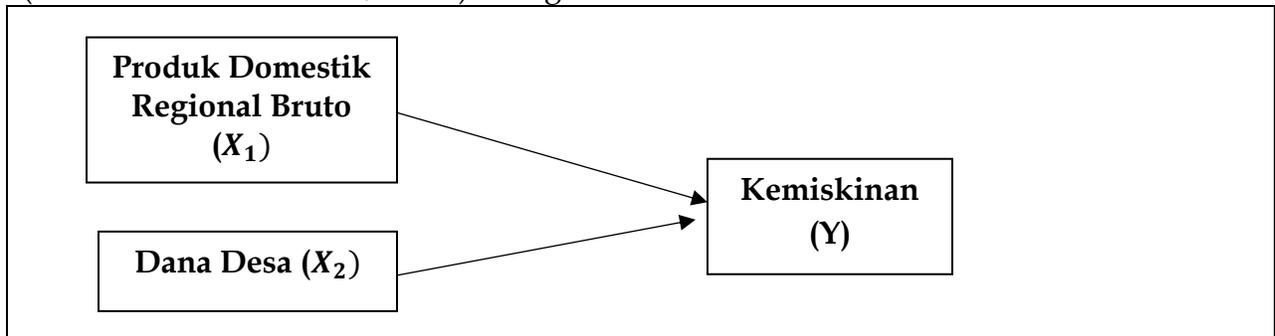
Besarnya jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa diharapkan mampu mewujudkan amanat undang-undang dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Program dana desa untuk setiap desa memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tentang pengaruh dana desa terhadap kemiskinan telah dilakukan oleh (Artino et al., 2019) dan (Hermawan & Ahmad, 2019) dengan

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{a2} : D berpengaruh terhadap kemiskinan

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptualnya dalam Gambar 2.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

C. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data diolah dengan bantuan software Eviews 11. Analisis regresi data panel merupakan gabungan dari data cross section dan time series, dimana sama unit penampang diukur pada waktu yang berbeda. Jadi dengan kata lain, data panel adalah data dari beberapa individu yang sama diamati dalam periode waktu tertentu.

Berbeda dengan regresi biasa, regresi data panel harus melalui estimasi yang tepat langkah pemodelan. Dalam metode pendugaan model regresi

dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga cara pendekatan, antara lain:

1) Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)

Pendekatan model data panel paling sederhana karena hanya menggabungkan data deret waktu dan lintas bagian. Dalam model ini tidak dianggap waktu dan dimensi individu, begitu juga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai periode. Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2) Model Efek Tetap (FE)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi intersep yang berbeda. Untuk memperkirakan data panel model *Fixed Effects* menggunakan variabel dummy teknik untuk menangkap perbedaan antara perusahaan mencegat, dapat mencegat yang berbeda terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian intersep yang sama antar perusahaan.

Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Variabel Dummy Kuadrat Terkecil (LSDV). Model efek tetap berbeda dari efek umum, tetapi masih menggunakan yang biasa-biasa saja prinsip persegi. Asumsi pemodelan yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap penampang dan waktu dinilai kurang realistis, sehingga dibutuhkan lebih banyak model untuk menangkap perbedaan.

Untuk memilih model yang paling sesuai, ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Prosedur kedua uji tersebut adalah sebagai berikut:

a) Uji *Chow* (Uji *Common Effect* dengan *Fixed Effect*)

H_0 : model mengikuti *common effect*. H_1 : model mengikuti *fixed effect*.

Keputusan: Tolak H_0 jika nilai *Probability* $< \alpha$. Kesimpulan: Jika H_0 ditolak maka, model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*.

b) Uji *Hausman* (Uji *Fixed Effect* dengan *Random Effect*)

H_0 : model mengikuti *random effect*. H_1 : model mengikuti *fixed effect*.

Keputusan: Tolak H_0 jika nilai *Probability* $< \alpha$.

Kesimpulan: Jika H_0 ditolak maka model *fixed effect* lebih baik daripada model *random effect*.

Selain dilakukan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier untuk mengetahui uji terbaik dalam pemilihan model, uji statistik juga dilakukann dalam penelitian ini antara lain uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan maupun secara parsial.

Model Regresi Data Panel

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode regresi data panel. Model persamaan regresinya dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X_{1it} = Indikator yang digunakan untuk mengukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten i untuk tahun t

X_{2it} = Indikator yang digunakan untuk mengukur Dana Desa kabupaten i untuk tahun t

e = *epsilon (error term)*

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan data panel dalam model analisis. Untuk itu perlu dilakukan pengujian model analisis. Dari tiga pendekatan model yaitu *common effect (Pooled Least Square/PLS)*, *fixed effect model* dan *random effect model* maka harus dipilih

satu model yang paling cocok untuk penelitian ini. Penentuan model ini diuji dengan uji chow. Hasil uji chow dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil uji chow pada Tabel 2 diketahui bahwa *Common Effect Model (Pooled Least Square/PLS)* direkomendasikan untuk digunakan sebagai teknik estimasi pada data panel untuk mengetahui dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Probability</i>
<i>Cross-section F</i>	0,766069	(19,38)	0,7289
<i>Cross-section Chi-Square</i>	19,456795	19	0,4279

Sumber: Data diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai *probability* untuk *cross-section F* adalah 0,7289. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai *probability* lebih besar dari 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H_0 dan menunjukkan bahwa model *common effect* lebih baik daripada model *fixed effect*. Dengan hasil *common effect* tersebut kemudian

dilakukan uji t, uji F dan R-Square pada output *common effect*.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil regresi data panel pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Desa terhadap Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 3.

Variabel	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob.
Konstanta	3061,191	1919,431	1,594843	0,1163
PDRB	0,000000149	0,0000000062	24,04140	0,0000
Dana Desa	0,0000000004	0,0000000002	1,953969	0,0556
R-squared	0,922743			
Adjusted R-Square	0,92032			
F-statistic	340,3994	Durbin-Watson Stat.		2,108974
Prob (F-statistic)	0,000000			

Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel
Sumber: Data diolah (2021).

Berdasarkan hasil regresi data panel seperti pada Tabel 3 di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi data panel berikut ini:

$$Y = 3.062,191 + 0,000000149PDRB_{it} + 0,0000000004DD_{it} + e_{it}$$

Tabel 3 menunjukkan beberapa poin penting untuk menjelaskan dampak alokasi dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Teknik PLS untuk 23 observasi menunjukkan koefisien determinasi (R^2) adalah 0,922743. Artinya variabel produk domestik regional bruto dan variabel dana desa bisa menjelaskan koefisien kemiskinan sebesar 92,27 persen, sedangkan sisanya 7,73 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model persamaan dalam penelitian ini. Kemampuan variabel penjelas ini juga dikonfirmasi oleh statistik F dengan probabilitas statistik F pada tingkat kepercayaan 99 persen atau α 1 persen.

Hipotesis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$; Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien regresi pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan diperoleh sebesar 0,000000149. Nilai ini menunjukkan bahwa $\beta_1 \neq 0$ sehingga H_{a1} diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan produk domestik regional bruto sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,000000149% dengan asumsi variabel dana desa adalah konstan.

Hipotesis pengaruh dana desa terhadap kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$; Dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien regresi pengaruh dana desa terhadap kemiskinan diperoleh sebesar 0,0000000004. Nilai ini menunjukkan bahwa $\beta_2 \neq 0$ sehingga H_{a3} diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif

terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan dana sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,0000000004% dengan asumsi variabel produk domestik regional bruto adalah konstan.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000149. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin besar produk domestik regional bruto, maka semakin besar kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan terjadinya ketimpangan dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia (World Bank, 2006). Hasil ini juga didukung oleh hasil penelitian (Mulok et al., 2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan tetapi tidak cukup untuk pengentasan kemiskinan, terutama jika tujuannya adalah pengentasan kemiskinan yang cepat dan berkelanjutan.

Teori lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah hasil penelitian (Suliswanto, 2010) yang menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, meskipun pertumbuhan Produk Domestik Bruto dikatakan bagus. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andhykha, Handayani, & Woyanti,

2018). Namun sedikit berbeda dengan hasil penelitian (Feriyanto, NurAiyubbi & Nurdany, 2020; Silastri, Iyan, & Sari, 2017; Susilowati et al., 2017) yang menyatakan produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000004. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin besar dana desa, maka semakin besar kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Susilowati et al., 2017) dan (Cita, Nurhanitah, Fahlia, Hasri, & Sanjani, 2020) yang menyatakan dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedikit berbeda dengan hasil penelitian (Artino et al., 2019; Hermawan & Ahmad, 2019; Putra, 2018) dan (Sunu & Utama, 2019) yang menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

E. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa produk domestik regional bruto dan dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Implikasi

Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa dana desa tidak dapat mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya dana yang terdesentralisasi dan karena sistem pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode waktu penelitian yang singkat yaitu hanya 3 tahun (2007 s.d 2019) dan hanya menganalisis dua faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu produk domestik regional bruto dan dana desa.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi kemiskinan yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113-123. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson From Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 433-442. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433>
- Artha, D. R. P., & Dartanto, T. (2018). Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39(3), 1-38.
- Artino, A., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara. *Tata Loka*, 21(3), 381-389. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.381-389>
- BPS. (2020a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2020*.
- BPS. (2020b). *Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan IV-2020*.
- Cita, F. P., Nurhanitah, S., Fahlia, F., Hasri, D. A., & Sanjani, M. R. (2020). The Influence of Village Fund and Its Allocation on Poverty Levels in Isolated Areas in Batulanteh District. *Proceedings of The 1st Annual Conference on Education and Social Sciences (ACCESS 2019)*, 465(Access 2019), 36-38. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.010>
- Feriyanto, NurAiyubbi, D. El, & Nurdany, A. (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product On Poverty Reduction In Provinces of Indonesia. *Asian*

- Economic and Financial Review*, 10(10), 1088–1099. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>
- Hamid, A., & Yusuf, M. (2018). The Effect of Gross Regional Domestic Product and The Rate of Open Unemployment. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 3(11), 13–21.
- Hermawan, A., & Ahmad, A. A. (2019). The Effect of Village Funds on Rural Poverty : Empirical Evidence From Java Island. In *International Conference on Rural Development and Enterprenerurship 2019: Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0* (Vol. 5, pp. 177–183).
- Johnson, K. S. (2017). *Quantitative Poverty : Relationship Between Poverty Level and Population Size , GDP, and Gini Coefficient*. Walden University Scholar Works.
- Mulok, D., Kogid, M., Asid, R., & Lily, J. (2012). Is Economic Growth Sufficient for Poverty Alleviation? Empirical Evidence From Malaysia. *Cuadernos de Economía*, 35, 26–32.
- Nguyen, H. H., & Nguyen, N. Van. (2019). Factor Affecting Poverty and Policy Implication of Poverty Reduction: A Case Study for the Khmer Ethnic People in Tra Vinh Province , Viet Nam *. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(1), 315–319. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no1.315>
- Nurpuspita, R., Sarfiah, S. N., & Ratnasari, E. D. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa Sebagai Realisasi Salah Satu Tujuan Program Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran” di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2016. *Directory Journal of Economic*, 1(2), 136–150.
- Purnama, N. I. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 62–70.
- Putra, H. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2), 1–15.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2018). The Implementation of Village Fund Policy in Improving Economy of Village Society. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(3), 459–478.
- Silastri, N., Iyan, R. Y., & Sari, L. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fekon*, 4(1), 105–117.
- Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village , South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences*, 250–268. <https://doi.org/10.4236/jss.2017.59>

018

Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357-366.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/347081468267333853/pdf/421010Aceh0Pov1nt0P010437501PUBLIC1.pdf>

Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843-872. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i08.p02>

Suryani, E., Permadi, L. A., & Serif, S. (2019). Identifikasi Karakteristik dan Profil Kemiskinan di Pulau Lombok: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(1), 27-41.

Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514-526.

Swastika, D. K. S., & Supriyatna, Y. (2008). The Characteristics of Poverty and Its Alleviation in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(2), 103-115. <https://doi.org/10.21082/fae.v26n2.2008.103-115>

World, B. (2008). *Aceh Poverty Assessment 2008*. Jakarta. Retrieved from